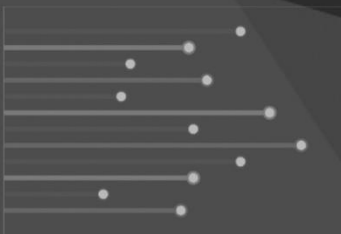


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN 2015-2019





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN 2015-2019



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran 2015-2019

ISSN: 2620-469X

No Publikasi : 33080.2006

Katalog: 9302020.3308

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 64 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pencetak:

TM Percetakan

Sumber Ilustrasi:

Suasana Pagi Desa Trasan, Kecamatan Bandongan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Ir. Sri Wiyadi, M.M

Penyunting:

Dewi Prastiwi, S.Si

Restu Asih Trianto, S.ST, M.M

Penulis:

Lestari Indriani, S.Si, M.Ec.Dev

Pengolah Data:

Lestari Indriani, S.Si, M.Ec.Dev

Infografis:

Restu Asih Trianto, S.ST, M.M

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (i) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), (ii) pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*), dan (iii) pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto Antardaerah (ekspor antardaerah dikurangi dengan impor antardaerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kota Mungkid, Mei 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Magelang,



Ir. Sri Wiyadi, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
INFOGRAFIS	1
Ringkasan Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
B. Kegunaan Statistik PDRB	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	13
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	16
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	18
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
E. Perubahan Inventori	24
F. Ekspor Impor Barang Dan Jasa	27
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MAGELANG, 2015-2019	29
A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran	31
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	35
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	37
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	38
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
F. Perkembangan Perubahan Inventori	40
G. Perkembangan Net Ekspor Antardaerah	42

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN	
	TAHUN 2015-2019	45
	A. PDRB (Nominal)	47
	B. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	47
	C. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
	D. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	49
	E. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	50
BAB V	PENUTUP	51
LAMPIRAN	55

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB ADH Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Triliun Rupiah)	31
Tabel 3.2. PDRB ADH Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Triliun Rupiah)	32
Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)	33
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)	35
Tabel 3.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)	35
Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magelang, 2015-2019	36
Tabel 3.7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Magelang, 2015-2019	38
Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Magelang, 2015-2019	38
Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Magelang, 2015-2019	40
Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Magelang, 2015-2019	41
Tabel 3.11. Net Ekspor ADH Berlaku dan Adh Konstan 2010, 2015-2019	43
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Magelang, 2015-2019	47
Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Magelang, 2015-2019	48
Tabel 4.3. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Magelang, 2015-2019	49
Tabel 4.4. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Magelang, 2015-2019	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 (Triliun Rupiah)	33
Gambar 3.2. Perbandingan Distribusi PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2015 dan 2019 (Persen)	34
Gambar 3.3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Magelang, 2015-2019 (Persen)	42

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	57
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	58
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	59
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	60
Lampiran 5. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	61
Lampiran 6. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	62
Lampiran 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	63
Lampiran 8. Perubahan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019	64

PDRB Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran



Perkembangan Nilai ICOR



Ringkasan Eksekutif

Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan performa yang kian membaik. Hal ini terlihat dari total nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang dapat digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Berlaku dan atas dasar harga (ADH) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku selama 2015-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku sebesar 24,15 triliun rupiah, meningkat menjadi 32,49 triliun rupiah di tahun 2019, atau terjadi peningkatan sekitar 34,54 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara itu, melalui pendekatan penghitungan ADH Konstan didapatkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Magelang adalah sebesar 22,08 triliun rupiah pada 2019, meningkat 23,26 persen dibanding tahun 2015, yang hanya mencapai 18,86 triliun rupiah.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor (E) atau ekspor dikurangi impor. Selama periode 2015-2019, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 72 persen), sedangkan konsumsi akhir pemerintah hanya memberi kontribusi sekitar 8 - 9 persen saja. Hal yang perlu diperhatikan adalah selama 2015-2019 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan posisi defisit. Ini berarti, nilai ekspor di Kabupaten Magelang selalu lebih rendah dari nilai impor.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2015 - 2019 terlihat fluktuatif tetapi masih di atas lima persen, dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan tercepat dalam kurun waktu tersebut. Adapun indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan nilai positif. Pada 2019, perubahan indeks harga implisit PDRB Kabupaten Magelang mencapai 1,70 persen, sedangkan pada 2015 mencapai 4,73 persen.

Di sisi lain, nilai *ICOR* yang sering diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran), besarnya terlihat fluktuatif namun cenderung meningkat, yaitu dari 5,27 pada 2015 menjadi 5,39 pada 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi belanja modal di Kabupaten Magelang semakin tidak efektif, karena butuh lebih besar kapital untuk mendapatkan 1 unit nilai output.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

B. Kegunaan Statistik PDRB

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

- A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)**
- B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)**
- C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)**
- D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**
- E. Perubahan Inventori**
- F. Ekspor Impor Barang Dan Jasa**

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki

3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT ADH Berlaku. PKRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT ADH konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT ADH Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT ADH Berlaku. PKLNPRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PKLNPRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari

Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (KPPN)
- Data realisasi APBD Tahunan (DPPKAD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADH Berlaku

Secara umum, PK-P ADH Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADH Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADH Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Laporan keuangan perusahaan.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di “reflate”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang

sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Sementara untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkut (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei;
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, dan ternak dari Dinas Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan:
a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data

harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;

- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antardaerah
 - Ekspor antardaerah
 - Impor antardaerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MAGELANG, 2015-2019

- A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran**
- B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga**
- C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT**
- D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah**
- E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**
- F. Perkembangan Perubahan Inventori**
- G. Perkembangan Net Ekspor Antardaerah**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Magelang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 sampai dengan 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Magelang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Berlaku dan atas dasar harga (ADH) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 3.1. PDRB ADH Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,82	19,07	20,47	21,90	23,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,45	0,49	0,52	0,58	0,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,13	2,21	2,38	2,58	2,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,57	7,04	7,71	8,89	9,66
5. Perubahan Inventori	0,80	0,65	0,35	0,40	0,54
<i>Net Ekspor</i>	<i>(3,62)</i>	<i>(3,22)</i>	<i>(3,25)</i>	<i>(4,00)</i>	<i>(4,45)</i>
PDRB PENGELUARAN	24,15	26,23	28,18	30,34	32,49

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku selama periode 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku sebesar 24,15 triliun rupiah meningkat menjadi 32,49 triliun rupiah di tahun 2019.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan sekitar 34,54 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume pada waktu tersebut.

Tabel 3.2. PDRB ADH Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Triliun Rupiah)

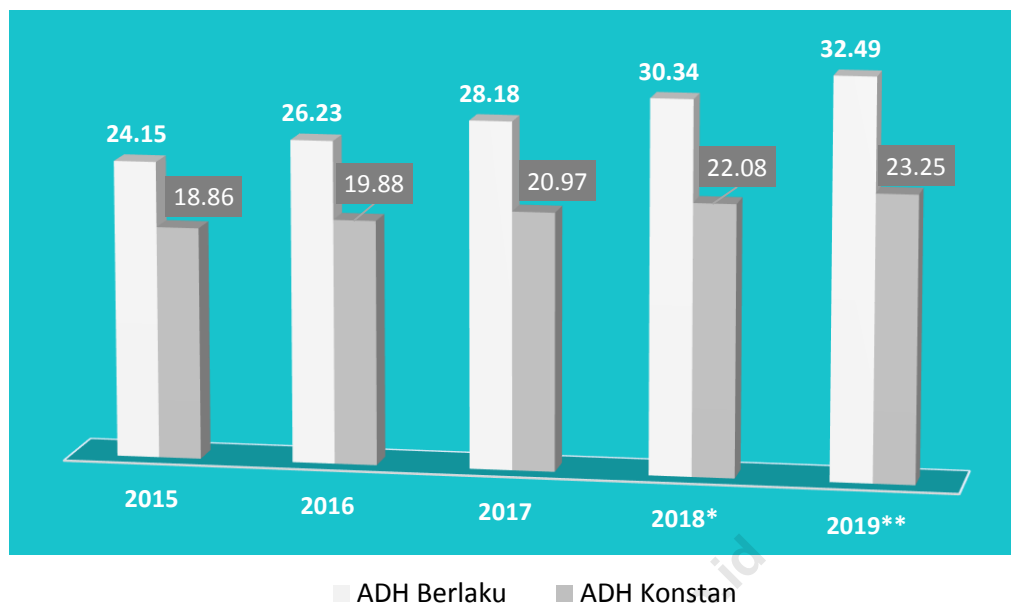
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,71	14,32	15,01	15,65	16,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,32	0,34	0,35	0,38	0,43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,46	1,47	1,52	1,60	1,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,89	5,12	5,48	6,00	6,30
5. Perubahan Inventori	0,16	0,18	0,26	0,33	0,47
<i>Net Ekspor</i>	<i>(1,67)</i>	<i>(1,54)</i>	<i>(1,64)</i>	<i>(1,87)</i>	<i>(1,96)</i>
PDRB PENGELUARAN	18,86	19,88	20,97	22,08	23,25

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai ADH Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADH Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADH Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015-2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang berdasarkan PDRB ADH Konstan 2010 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Berdasarkan Gambar 3.1, nampak bahwa nilai PDRB ADH Berlaku lebih besar dari nilai PDRB ADH Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADH Berlaku. Sementara itu, pada PDRB ADH Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.



Keterangan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 (Triliun Rupiah)

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya. Komponen-komponen PDRB menurut pengeluaran terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), serta net ekspor (E) atau ekspor dikurangi impor. Adapun distribusi masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)

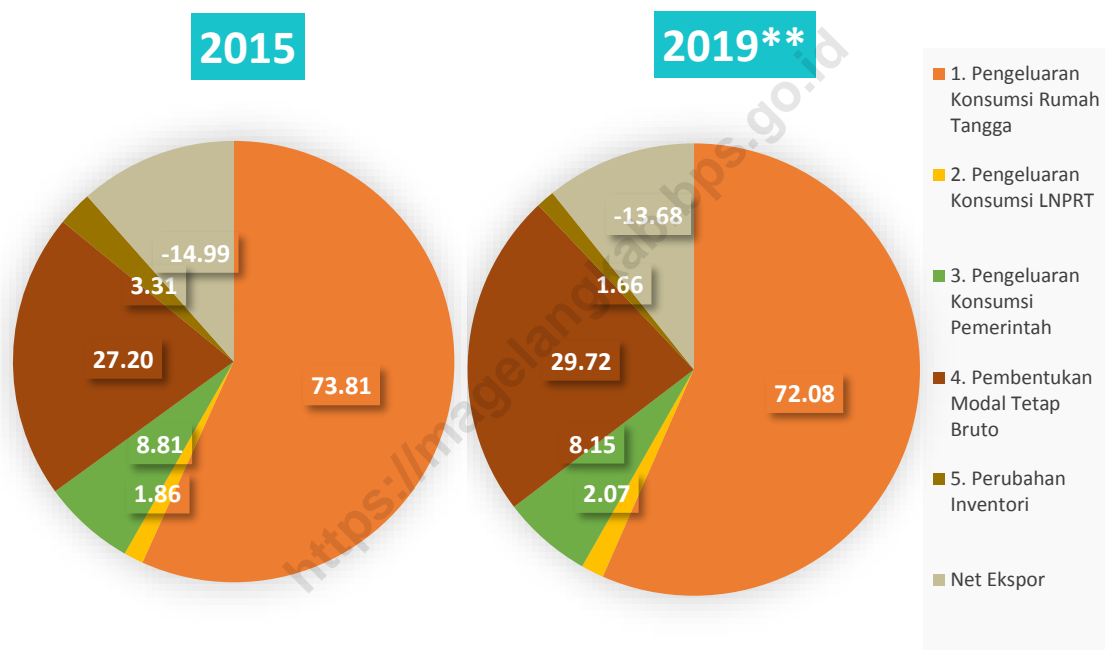
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,81	72,68	72,62	72,17	72,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86	1,87	1,86	1,90	2,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,81	8,42	8,46	8,51	8,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,20	26,83	27,35	29,29	29,72
5. Perubahan Inventori	3,31	2,47	1,24	1,31	1,66
<i>Net Ekspor</i>	<i>(14,99)</i>	<i>(12,28)</i>	<i>(11,53)</i>	<i>(13,19)</i>	<i>(13,68)</i>
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir

rumah tangga , yaitu di atas 72 persen. Sementara itu, PMTB memberikan kontribusi sebesar 26 hingga 30 persen dari total PDRB Kabupaten Magelang. Di sisi lain, konsumsi akhir pemerintah hanya memberi kontribusi tidak lebih dari 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik belum terlalu besar.

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar. Pada tahun 2015-2019 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Ini artinya, perdagangan Kabupaten Magelang selalu menunjukkan posisi “defisit”.



Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Gambar 3.2. Perbandingan Distribusi PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2015 dan 2019 (Persen)

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2015 - 2019 cenderung fluktuatif, dengan masing-masing pertumbuhan di atas lima persen. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang sebesar 5,18 persen. Selanjutnya pada 2016-2019, berturut-turut sebesar 5,39 persen; 5,50 persen; 5,28 persen; dan 5,30 persen. Laju pertumbuhan tercepat terjadi pada tahun 2017, mencapai 5,50 persen. Sebaliknya, pertumbuhan terlambat terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,18 persen.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang ADH Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,08	4,45	4,82	4,27	4,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(1,28)	5,39	4,23	7,41	13,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,43	0,57	3,41	4,86	2,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,49	4,81	6,97	9,49	5,01
PDRB PENGELUARAN	5,18	5,39	5,50	5,28	5,30

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan secara umum. Hal ini terlihat dari perubahan indeks implisit total yang bernilai positif. Keterangan lebih lanjut mengenai Indeks Implisit tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2015 - 2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,63	2,41	2,42	2,60	2,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,54	3,26	2,51	2,63	2,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,34	3,23	4,36	3,29	0,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,36	2,26	2,35	5,31	3,45
PDRB PENGELUARAN	4,73	3,07	1,84	2,25	1,70

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 3.6 menunjukkan hal tersebut, yaitu sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam

kurun waktu 2015-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik secara nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan). Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Secara teori, kenaikan jumlah penduduk tersebut akan mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magelang, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	17,82	19,07	20,47	21,90	23,42
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	13,71	14,32	15,01	15,65	16,38
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	73,81	72,68	72,62	72,17	72,08
Rata-rata konsumsi per-rumahtangga/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	51,35	53,17	56,20	59,22	62,39
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	39,49	39,93	41,21	42,32	43,62
Rata-rata konsumsi perkapita/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	14,31	15,17	16,14	17,11	18,15
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	11,01	11,39	11,83	12,23	12,69
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total Konsumsi RT	4,08	4,45	4,82	4,27	4,65
b. Per-Rumahtangga	2,48	1,12	3,20	2,68	3,09
c. Perkapita	3,09	3,49	3,89	3,35	3,77

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Kabupaten Magelang pada periode tahun 2015 - 2019 masih tinggi (di atas 72 persen). Akan tetapi menunjukkan tren menurun. Pada 2015, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 73,81 persen dan menurun setiap tahun, hingga pada 2019 menjadi sebesar 72,08 persen.

Penurunan proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB tersebut tidak sejalan dengan rata-rata konsumsi rumah tangga. Secara umum, rata-rata konsumsi baik per rumah tangga maupun per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Atas dasar harga berlaku, pada 2015 konsumsi akhir rumah tangga per kapita sebesar 14,31 juta rupiah. Hal ini berarti setiap penduduk Kabupaten Magelang

rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 14,31 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan rata-rata konsumsi per kapita tahun 2019 mencapai 18,15 juta rupiah.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita semakin meningkat dari sebesar 3,09 persen pada 2015 menjadi 3,77 persen pada 2019. Selama 2015 hingga 2019, pertumbuhan konsumsi per kapita sudah di atas tiga persen setiap tahunnya.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik maupun yang berasal dari impor turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADH Konstan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari Tabel 3.6 nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada pada kisaran 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT (PKLNPR) dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi dalam perekonomian suatu wilayah masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPR adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Berdasar Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Pertumbuhan tahun 2018 dan 2019 cukup tinggi, yang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran ormas, parpol, LSM dan lembaga lainnya karena adanya pemilihan kepala daerah (bupati dan gubernur) pada tahun 2018.

Sementara itu, pada 2015 konsumsi LNPRT justru mengalami pertumbuhan negatif (konstraksi), sebesar 1,28 persen. Konstraksi ini diakibatkan oleh penurunan belanja, terutama belanja dari organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan pada

tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, pasca pesta demokrasi. Pada 2016 sampai dengan 2019 konsumsi LNPRT kembali mengalami pertumbuhan di atas empat persen.

Tabel 3.7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Magelang, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	0,45	0,49	0,52	0,58	0,67
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	0,32	0,34	0,35	0,38	0,43
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	1,86	1,87	1,86	1,90	2,07
Pertumbuhan (% ADHK)	-1,28	5,39	4,23	7,41	13,90

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Magelang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Magelang, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	2,13	2,21	2,38	2,58	2,65
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1,46	1,47	1,52	1,60	1,63
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	8,81	8,42	8,46	8,51	8,15
Rata-rata konsumsi Pemerintah perkapita/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	1,71	1,76	1,88	2,02	2,05
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	1,18	1,17	1,20	1,25	1,27
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	2,43	0,57	3,41	4,86	2,29
c. Konsumsi Pemerintah Perkapita	1,46	-0,36	2,49	3,94	1,42

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADH Berlaku maupun ADH Konstan 2010. Pada 2015, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 2,13 triliun rupiah, yang terus meningkat hingga pada 2019 nilainya mencapai 2,65 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADH Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi. Dari 8,81 persen pada 2015 menjadi 8,15 persen pada 2019. Kondisi 2019 tersebut merupakan proporsi terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pada prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang secara total menunjukkan peningkatan, diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku sebesar 1,71 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per kapita mencapai 2,05 juta rupiah.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan fluktuasi, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2018, sebesar 4,86 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,57 persen. Kondisi yang hampir sama terjadi pada pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2018, yang mencapai 3,94 persen. Sementara pertumbuhan terlambat terjadi pada 2016, dengan kontraksi sebesar 0,36 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil*.

Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Magelang, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	6,57	7,04	7,71	8,89	9,66
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	4,89	5,12	5,48	6,00	6,30
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	27,20	26,83	27,35	29,29	29,72
Pertumbuhan (% ADHK)	4,49	4,81	6,97	9,49	5,01

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.9 menjelaskan bahwa selama kurun waktu 2015-2019, baik berdasarkan ADH Berlaku maupun ADH Konstan, nilai PMTB Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, meskipun tren nominalnya menunjukkan kenaikan, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB terlihat fluktuatif. Pada 2015, pertumbuhan PMTB mencapai 4,49 persen. Sementara pada 2018 sempat mengalami percepatan sebesar 9,49 persen. Kemudian pada 2019, pertumbuhan PMTB mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya menjadi 5,01 persen. Adapun rata-rata proporsi PMTB terhadap PDRB Pengeluaran selama kurun waktu tersebut, sebesar 28,08 persen.

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antardaerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung

berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Magelang, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	0,80	0,65	0,35	0,40	0,54
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	0,16	0,18	0,26	0,33	0,47
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	3,31	2,47	1,24	1,31	1,66

Keterangan:

* Angka Sementara

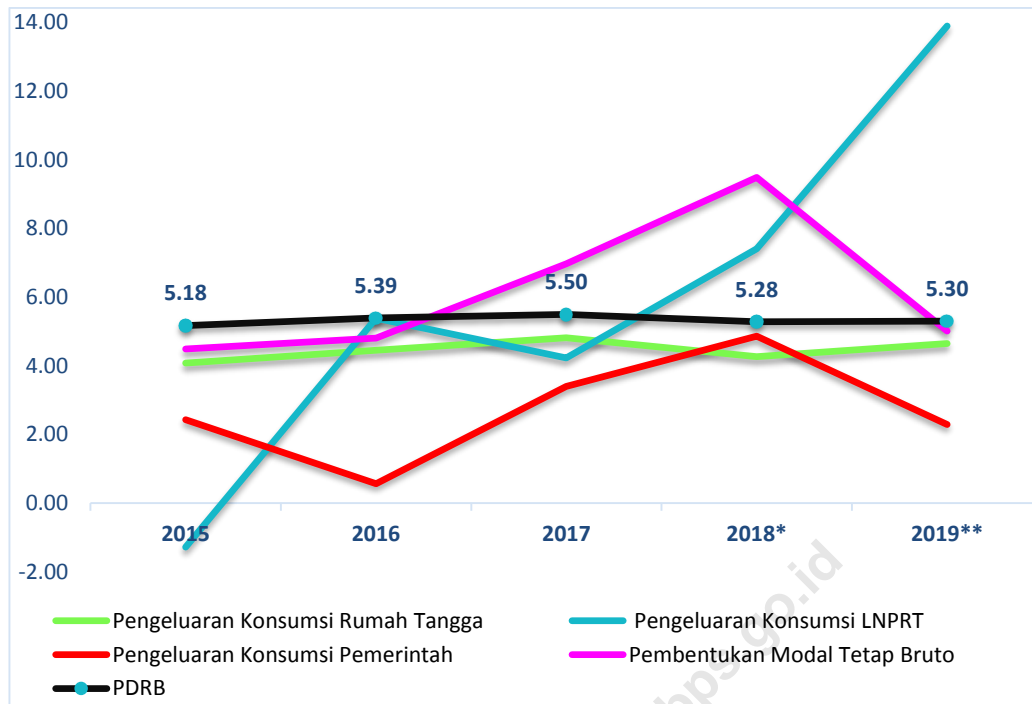
** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, yang dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Secara nominal, ADH Berlaku untuk komponen perubahan inventori menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada 2017, nominal ADH Belaku hanya mencapai 0,35 triliun rupiah. Capaian tersebut merupakan yang terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Akan tetapi sesudah 2017, tren komponen ini mulai menunjukkan peningkatan.

Kondisi berbeda justru ditunjukkan oleh nominal ADH Konstan. Selama 2015-2019, komponen perubahan inventori menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada kurun waktu tersebut, terjadi kenaikan hampir mencapai 201 persen.

Sejalan dengan nominal ADHB, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB di Kabupaten Magelang selama periode 2015-2019 juga fluktuatif. Pada 2019, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB adalah sebesar 1,66 persen. Kondisi ini menempati posisi terendah ketiga dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika dicermati, berdasarkan Tabel 3.10, proporsi perubahan inventori terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 1,24 persen, dan tertinggi sebesar 3,31 persen pada 2015.



Keterangan: * Sementara
 ** Sangat Sementara

Gambar 3.3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Magelang, 2015-2019 (Persen)

G. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTARDAERAH

Net ekspor antardaerah didefinisikan sebagai ekspor antardaerah dikurangi impor antardaerah. Pada penghitungan ekspor-impor antardaerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antardaerah dan impor antardaerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antardaerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antardaerah lebih besar dari pada impor antardaerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antardaerah menjadi nilai ekspor antardaerah dan nilai impor antardaerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Dari tabel 3.11 dapat dilihat gambaran ekspor dan impor antardaerah, yaitu ekspor Kabupaten Magelang ke Kabupaten/Kota lain serta impor dari Kabupaten/Kota lain ke Kabupaten Magelang. Terlihat bahwa nilai ekspor antardaerah selalu lebih kecil dibanding nilai impornya, sehingga net ekspor antardaerah selalu negatif dari tahun ke tahun.

Tabel 3.11. Net Ekspor ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor ADHB (Triliun rupiah)	(3,62)	(3,22)	(3,25)	(4,00)	(4,45)
Net Ekspor ADHK 2010 (Triliun rupiah)	(1,67)	(1,54)	(1,64)	(1,87)	(1,96)

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019

- A. PDRB (Nominal)**
- B. Perbandingan Konsumsi Akhir
Rumah Tangga Terhadap PMTB**
- C. Proporsi Konsumsi Akhir
Terhadap PDRB**
- D. Neraca Perdagangan
(*Trade Balance*)**
- E. *Incremental Capital Output Ratio*
(*ICOR*)**

Berbagai indikator ekonomi makro yang seringkali digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Magelang, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	24,15	26,23	28,18	30,34	32,49
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	18,86	19,88	20,97	22,08	23,25
PDRB Perkapita					
a. ADHB (Juta Rupiah)	19,39	20,87	22,22	23,71	25,18
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	15,15	15,82	16,54	17,26	18,02
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. PDRB	5,18	5,39	5,50	5,28	5,30
c. PDRB Perkapita	4,18	4,42	4,56	4,36	4,41
Jumlah penduduk (ribu)	1 245,50	1 257,12	1 268,40	1 279,63	1 290,59

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

B. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Berdasarkan tabel 4.2. dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Kabupaten Magelang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Magelang, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Triliun rupiah)	17,82	19,07	20,47	21,90	23,42
Total PMTB (Triliun rupiah)	6,57	7,04	7,71	8,89	9,66
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,71	2,71	2,66	2,46	2,43

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama 2015-2019 adalah sebesar 2,59. Hal ini dapat diartikan, penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 2,59 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung stabil selama lima tahun terakhir, namun setiap tahun terjadi penurunan rasio. Penurunan tersebut lebih disebabkan peningkatan nilai PMTB yang cukup besar di kurun waktu tersebut.

C. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Berdasarkan Tabel 4.3, lebih dari 80 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Magelang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari 84,48 persen pada 2015 menjadi 82,30 persen pada 2019. Sementara itu, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir memiliki peran relatif kecil, yaitu kurang dari 20 persen.

Tabel 4.3. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Magelang, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (Triliun Rupiah)					
a. Rumah Tangga	17,82	19,07	20,47	21,90	23,42
b. LNPRT	0,45	0,49	0,52	0,58	0,67
c. Pemerintah	2,13	2,21	2,38	2,58	2,65
Jumlah	20,40	21,76	23,38	25,06	26,74
PDRB (Triliun Rupiah)					
	24,15	26,23	28,18	30,34	32,49
Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB (%)					
	84,48	82,97	82,94	82,58	82,30

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

D. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Net Ekspor”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selama periode 2015-2019, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magelang dengan luar daerah dan antar kabupaten/kota, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magelang selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran uang keluar.

E. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. *ICOR* juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter **Nilai Tambah**.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan:

I_t = PMTB tahun ke t;

Y_t = Output tahun ke t;

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dengan menggunakan rasio ini, maka *ICOR* mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Hal ini dapat diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Tabel 4.4 *Incremental Capital Output Ratio* Kabupaten Magelang, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Triliun rupiah)	18,86	19,88	20,97	22,08	23,25
Perubahan PDRB ADHK 2010 (Triliun rupiah)	0,93	1,02	1,09	1,11	1,17
PMTB ADHK 2010 (Triliun rupiah)	4,89	5,12	5,48	6,00	6,30
<i>ICOR</i>	5,27	5,04	5,02	5,42	5,39

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4.4 menunjukkan besaran *ICOR* meningkat dari 5,27 pada 2015 menjadi 5,39 pada 2019. Semakin tinggi nilai *ICOR* menunjukkan semakin besar kapital yang digunakan untuk dapat meningkatkan 1 unit nilai output. Ini berarti, investasi belanja modal semakin tidak efektif.

BAB V PENUTUP

<https://magelangkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015-2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Magelang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antardaerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kabupaten Magelang tahun 2019 ADH Berlaku mencapai 32,49 triliun rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 82,30 persen. Adapun 72,08 persennya merupakan konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang.
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan *issue* yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk modal/fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Magelang dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Pada kurun waktu tahun 2015-2019 proporsi PMTB atau peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Magelang kurang dari 30 persen.
4. Nilai Net Ekspor Kabupaten Magelang setiap tahun bernilai negatif, yang artinya nilai impor lebih besar dari nilai eksportnya. Secara nominal, defisit ini justru meningkat dari 3,62 triliun rupiah pada 2015 menjadi 4,45 triliun rupiah di tahun 2019.
5. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

LAMPIRAN

<https://magelangkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2015-2019**

Juta Rupiah					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17 824 181,25	19 066 541,09	20 468 392,81	21 897 417,21	23 419 218,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	449 989,77	489 720,93	523 285,99	576 845,07	672 077,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 127 326,48	2 208 562,37	2 383 355,30	2 581 515,79	2 649 272,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6 568 276,66	7 039 221,20	7 707 266,58	8 887 094,04	9 655 036,54
5. Perubahan Inventori	798 999,71	649 095,83	350 349,58	398 077,85	540 702,32
6. <i>Net Ekspor</i>	<i>(3 620 129,71)</i>	<i>(3 220 792,37)</i>	<i>(3 248 796,25)</i>	<i>(4 001 484,49)</i>	<i>(4 445 507,02)</i>
PDRB	24 148 644,16	26 232 349,05	28 183 854,01	30 339 465,47	32 490 800,51

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019

Juta Rupiah					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13 707 302,81	14 317 884,58	15 007 593,11	15 647 776,86	16 376 073,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	319 783,09	337 020,13	351 286,01	377 313,73	429 760,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 464 115,58	1 472 425,17	1 522 577,72	1 596 623,15	1 633 213,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 889 692,78	5 124 683,83	5 481 954,78	6 002 230,75	6 303 160,94
5. Perubahan Inventori	157 169,35	175 083,72	255 867,44	325 394,89	472 863,40
6. <i>Net Ekspor</i>	<i>(1 673 411,64)</i>	<i>(1 544 853,19)</i>	<i>(1 644 478,05)</i>	<i>(1 866 543,48)</i>	<i>(1 961 917,85)</i>
PDRB	18 864 651,97	19 882 244,24	20 974 801,01	22 082 795,90	23 253 154,32

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,86	6,97	7,35	6,98	6,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,14	8,83	6,85	10,24	16,51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,98	3,82	7,91	8,31	2,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,14	7,17	9,49	15,31	8,64
PDRB	10,15	8,63	7,44	7,65	7,09

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,08	4,45	4,82	4,27	4,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(1,28)	5,39	4,23	7,41	13,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,43	0,57	3,41	4,86	2,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,49	4,81	6,97	9,49	5,01
PDRB	5,18	5,39	5,50	5,28	5,30

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2015-2019**

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,81	72,68	72,62	72,17	72,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86	1,87	1,86	1,90	2,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,81	8,42	8,46	8,51	8,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,20	26,83	27,35	29,29	29,72
5. Perubahan Inventori	3,31	2,47	1,24	1,31	1,66
6. Net Ekspor	(14,99)	(12,28)	(11,53)	(13,19)	(13,68)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,66	72,01	71,55	70,86	70,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,70	1,70	1,67	1,71	1,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,76	7,41	7,26	7,23	7,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,92	25,78	26,14	27,18	27,11
5. Perubahan Inventori	0,83	0,88	1,22	1,47	2,03
6. Net Ekspor	(8,87)	(7,77)	(7,84)	(8,45)	(8,44)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	130,03	133,17	136,39	139,94	143,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	140,72	145,31	148,96	152,88	156,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	145,30	149,99	156,53	161,69	162,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	134,33	137,36	140,59	148,06	153,18
5. Perubahan Inventori	508,37	370,73	136,93	122,34	114,35
6. Net Ekspor	216,33	208,49	197,56	214,38	226,59
PDRB	128,01	131,94	134,37	137,39	139,73

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Perubahan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,63	2,41	2,42	2,60	2,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,54	3,26	2,51	2,63	2,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,34	3,23	4,36	3,29	0,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,36	2,26	2,35	5,31	3,45
PDRB	4,73	3,07	1,84	2,25	1,70

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511,
Telp (62-293) 788143, Faks (62-293) 788143,
E-Mail : bps3308@bps.go.id Homepage: <http://magelangkab.bps.go.id>

ISSN 2620-469X

